

**IMPLIKASI PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL DAN ENERGI NOMOR 18 TAHUN 2021 TERHADAP
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA (KKKS) UNTUK
MEMENUHI KEBUTUHAN MINYAK DI DALAM NEGERI**

SKRIPSI

Oleh

**Sukses Simanjuntak
2040057025**



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2022**



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Sukses Simanjuntak
NIM : 2040057025
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul "**Implikasi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2021 terhadap Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Untuk Memenuhi Kebutuhan Minyak Di Dalam Negeri**" adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana hukum di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



Sukses Simanjuntak
NIM: 2040057025



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA.
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

Oleh:

Nama : Sukses Simanjuntak
NIM : 2040057025
Program Studi : Hukum
Peminatan/Program Kekhususan : Hukum Ekonomi
Judul : Implikasi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2021 Terhadap Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Untuk Memenuhi Kebutuhan Minyak Di Dalam Negeri.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, Juli 2022

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum.)

(Edward ML. Panjaitan S.H., LL.M)

Ketua Program Studi Hukum

(Dr. Poltak Siringoringo, S.H.,M.H.)



(Tomson Situmeang S.H.,M.H.)



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Pada tanggal 27 Juli 2022 telah diselenggarakan Sidang Skripsi untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Sukses Simanjuntak
NIM : 2040057025
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum
Judul : Implikasi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2021 terhadap Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Untuk Memenuhi Kebutuhan Minyak Di Dalam Negeri.

oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Peguji

Jabatan dalam

Tanda Tangan

Tim Penguji

1. Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum. Ketua

2. Edward ML. Panjaitan S.H., LL.M. Anggota

3. Inri Januar S.H., M.H.

Anggota



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA.
FAKULTAS HUKUM

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sukses Simanjuntak

NIM : 2040057025

Program Studi : Hukum

Jenis Tugas Akhir : Skripsi

Judul : Implikasi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Nomor 18 Tahun 2021 Terhadap Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Untuk Memenuhi Kebutuhan Minyak Di Dalam Negeri.

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, Juli 2022



(Sukses Simanjuntak)

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Syukur kepada Tuhan Yesus, atas karuniaNya, bahwa Skripsi saya yang berjudul **“Implikasi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2021 terhadap Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Untuk Memenuhi Kebutuhan Minyak di Dalam Negeri”**, dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Adapun judul ini dipilih berdasarkan pengalaman penulis dalam menghadapi permasalahan pengadaan minyak mentah dari dalam negeri atas implikasi kebijakan pemerintah melalui Permen ESDM Nomor 42 Tahun 2018 tentang Prioritas Pemanfaatan Minyak Bumi Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri Permen, dan digantikan dengan Permen ESDM Nomor 18 Tahun 2021 tentang Prioritas Pemanfaatan Minyak Bumi Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri.

Dalam rangka mengurangi defisit neraca perdagangan, dengan tujuan penghematan devisa dan pemenuhan kebutuhan BBM dalam negeri, maka pemerintah membuat kebijakan pemanfaatan 75% minyak KKKS, selain 25% telah diberikan ke pemerintah sebagai *Domestic Market Obligation (DMO)*, melalui kementerian ESDM dengan menerbitkan Permen ESDM Nomor 42 Tahun 2018 tentang Prioritas Pemanfaatan Minyak Bumi Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri Permen, dan digantikan dengan Permen ESDM Nomor 18 Tahun 2021 tentang Prioritas Pemanfaatan Minyak Bumi Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri. Sekalipun seluruhnya bagian KKKS dijual ke PT. Pertamina (Persero), tetap saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga impor minyak mentah dan produk tetap dilakukan PT. Pertamina (Persero). Implikasi permen ESDM dimaksud menimbulkan permasalahan, antara lain, harga yang disepakati cenderung lebih mahal dibandingkan dengan harga impor, karena beberapa KKKS menawarkan harga dengan menambahkan komponen pajak jual dalam negeri, dan biaya pengganti minyak mentah yang akan dibeli di luar negeri dan rekomendasi ekspor menjadi lebih lambat. Secara teori perundang-undangan proses penerbitan Permen ESDM dinilai sudah sesuai dengan hierarki tingkat kewenangan dan tugas fungsi kementerian terkait, dan untuk teori kepastian hukum atas implikasi Permen ini terlaksana sesuai dengan konsep penerbitannya namun tidak tujuan bisa tercapai sepenuhnya. Kemudian secara teori peraturan perundang-

undangan bahwa penerbitan permen sudah sesuai dengan hierarki aturan dan tugas serta tanggungjawab institusi yang menerbitkan, sebagai aktualisasi arahan pemerintah pusat. Secara teori kepastian hukum, bahwa permen ini dapat dipahami namun diperlukan petunjuk teknis sebagai dasar pelaksanaannya.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada isteri tercinta Ir. Enita R. Nainggolan M.H., dan anak-anakku tersayang Andre Sumanta Yesyurun ST., Naomi Miryam SM., dan Willyam Christian yang tetap memberikan dorongan selama kuliah dan dalam penyelesaian skripsi ini. Kemudian secara khusus saya sangat berterimakasih kepada dosen pembimbing Ibu Dr. Rr. Ani Wijayati S.H., M.Hum., yang dengan teliti membimbing dan mengarahkan penyelesaian skripsi ini dan Bapak Edward ML Panjaitan S.H., LL.M., yang telah membimbing dan memberikan masukan-masukan untuk kesempurnaan skripsi ini. Selanjutnya saya mengucapkan terimakasih kepada Ketua Prodi Program Studi Hukum Bapak Dr. Poltak Siringoringo S.H., M.H., Pjs. Dekan Fakultas Hukum UKI, Bapak Tomson Situmeang S.H., M.H., Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum UKI, karyawan administrasi FH UKI, dan rekan-rekan mahasiswa angkatan tahun 2020, atas semua supportnya, sehingga perkuliahan dan skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, untuk itu penulis mengharapkan saran dan masukan untuk penyempurnaannya.

Jakarta, Juli 2022
Penulis,

Sukses Simanjuntak/
NIM 2040057025

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
HALAMAN PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	xi
BAB I. PENDENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Ruang Lingkup Penelitian	10
D. Tujuan Penelitian	11
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual	11
F. Metode Penelitian	13
G. Sistimatika Penulisan	16
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Kerangka Teori	18
1. Teori Perundang-undangan.	18
2. Teori Kepastian Hukum	25
B. Kerangka Konsep	36
1. Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi	36
2. Kontrak Bagi Hasil	38
BAB III ATURAN HUKUM TENTANG KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA BIDANG PEMANFAATAN MINYAK BUMI DI INDONESIA	42
A. Sejarah Perminyakan di Indonesia	42
B. Kebijakan Pengelolaan Minyak Bumi dan Gas	46
C. Kontrak Bagi Hasil	49
D. Aturan <i>Domestic Market Obligation</i>	55

BAB IV IMPLIKASI PENERAPAN PERATURAN MENTARI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 18 TAHUN 2021 TERHADAP KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA DI INDONESIA	62
A. Pelaksanaan Permen ESDM Nomor 42 Tahun 2018.	62
B. Penerapan Permen ESDM Nomor 18 Tahun 2021	68
C. Analisa Perubahan Permen ESDM Nomor 42 Tahun 2018 menjadi Permen ESDM Nomor 18 Tahun 2021	72
D. Analisa Hukum Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2021	74
1. Analisa Teori Perundang-undangan	74
2. Analisa Teori Kepastian Hukum	83
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	86
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	89

ABSTRAK

- A.Nama : Sukses Simanjuntak
B. NIM : 2040057025
C. Judul : Implikasi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2021 terhadap Kontraktor Kerja Sama (KKKS) Untuk Memenuhi Kebutuhan Minyak Di Dalam Negeri.
D. Kata Kunci : *Production Sharing Contract (PSC), Domestic Market Obligation (DMO), Harga.*
E. Halaman : i-x, 91 Halaman + Daftar Pustaka
F. Daftar Acuan : 23 Buku, 18 Perundang-undangan, 20 Website, 1 Kamus.
G. Ringkasan Isi:

Kebutuhan BBM dalam negeri tidak bisa dipenuhi dari Kilang Pertamina, sehingga dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dilakukan importasi minyak mentah dan produk, yang dinilai menyebabkan defisit neraca perdagangan Indonesia dan pemerintah membuat kebijakan menerbitkan Permen ESDM Nomor 18 Tahun 2021, agar KKKS memprioritaskan penjualan minyak ke Pertamina dengan harga sepakat sesuai kelaziman bisnis. Permasalahannya adalah bagaimana pengaturan hukum tentang Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) bidang pemanfaatan minyak bumi dan implikasinya terhadap KKKS.

Metode penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian hukum normatif dengan menganalisa perundang-undangan yang berlaku.

Dalam mekanisme Kontrak Bagi Hasil, KKKS wajib menyerahkan 25% bagiannya ke pemerintah untuk kebutuhan dalam negeri, sementara 75% lainnya bebas dijual ke pasar, di arahkan agar dijual ke Pertamina. Kenyataannya Implikasi permen ini dinilai menimbulkan permasalahan, antara lain, sebagian KKKS menawarkan harga yang disepakati lebih mahal dari harga impor, karena beberapa KKKS menawarkan harga dengan menambahkan komponen pajak penjualan dalam negeri, biaya pengganti minyak yang akan dibeli di luar negeri dan proses penerbitan rekomendasi ekspor menjadi lebih lambat dan tujuan kebijakan tidak bisa tercapai sepenuhnya. Pihak Pertamina diberikan fleksibilitas untuk memilih minyak mentah dari kontraktor sepanjang dinilai ekonomis dan lebih murah dibandingkan impor. Aturan Permen ini dapat dikatakan hanya sebagai himbauan untuk bertransaksi antara Pertamina dengan KKKS.

H. Dosen Pembimbing I : Dr. Rr. Ani Wijayati S.H., M.Hum.
Dosen Pembimbing II: Edward ML Panjaitan S.H., LL.M.

Jakarta, 27 Juli 2022
Penulis

Sukses Simanjuntak

ABSTRACT

- A. Name : Sukses Simanjuntak
B. NIM : 2040057025
C. Title : Implications of Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 18 of 2021 on Cooperation Contractors (KKKS) To Fulfill Domestic Oil Requirement
D. Keywords : Production Sharing Contract (PSC), Domestic Market Obligation (DMO), Price.
E. Pages : i-vi, 91 Pages + Bibliography
F. Reference List : 23 Books, 18 Legislations, 20 Websites, 1 Dictionary.
G. Summary of Contents:

Domestic fuel consumption cannot be fulfilled from the Pertamina Refinery, so in order to meet the needs of the community, crude oil and products are imported, which are considered to be causing Indonesia's trade balance deficit and the government has made a policy to issue MEMR Regulation No. 18 of 2021, so that KKKS prioritize oil sales to Pertamina at a deal price according to business practice. The problem is how to regulate the law regarding Cooperation Contract Contractors (KKKS) in the field of petroleum utilization and its implications for KKKS.

The research method used is a normative legal research method by analyzing the applicable legislation.

Under the Production Sharing Contract mechanism, KKKS are obliged to hand over 25% of their share to the government for domestic needs, while the other 75% are free to sell to the market, directed to be sold to Pertamina. In fact, the implication of this regulation is considered to arise problems, among others, the deal price is more expensive than the import price, because some KKKS offer prices with a domestic sales tax component, the cost of instead of oil to be purchased abroad and the process of issuing export recommendations is slower and slower. policy objectives cannot be fully achieved. Pertamina is allowed the flexibility to choose crude oil from contractors as long as it is considered economical and cheaper than imports. This regulation can be assumed merely as a suggestion for transactions between Pertamina and KKKS.

H. Supervisor: 1. Dr. Rr. Ani Wijayati S.H., M.Hum.
2. Edward ML Panjaitan S.H., LL.M.

Jakarta, 18th of July 2022
Penulis

Sukses Simanjuntak